Katalog : 4102004.3327

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PEMALANG 2019

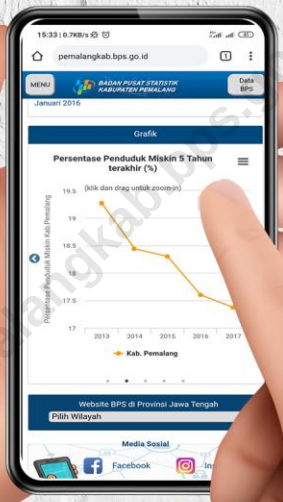

https://pemalangkab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PEMALANG

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PEMALANG 2019

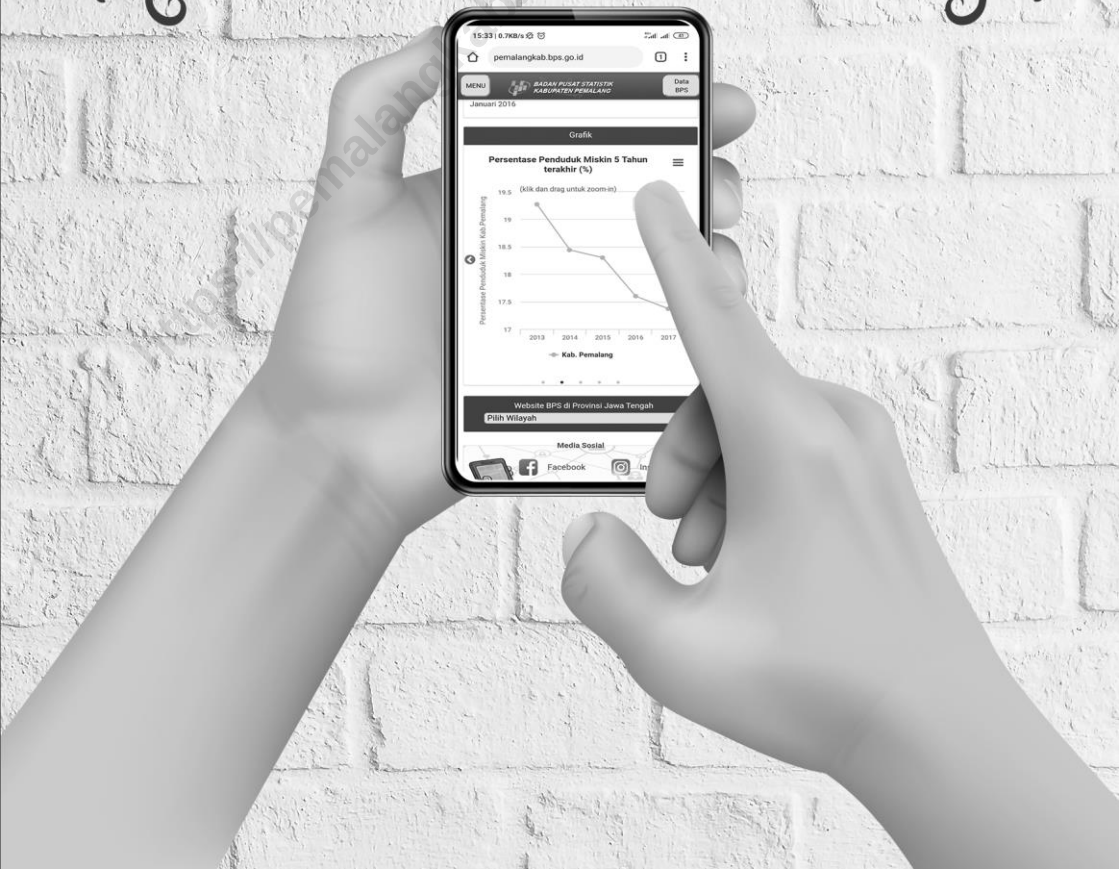

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PEMALANG 2019

No Katalog BPS : 4102004.3327

No Publikasi : 33270.1919

Ukuran Buku : 14,81 cm x 21,01 cm

Jumlah Halaman : xvi + 48

Naskah : BPS Kabupaten Pemalang

Penyunting : BPS Kabupaten Pemalang

Gambar Kover : BPS Kabupaten Pemalang

Diterbitkan : BPS Kabupaten Pemalang

Dilarang mengumumkan, menditribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

https://pemalangkab.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Penting kiranya kesejahteraan rakyat terekam waktu demi waktu dalam sebuah data statistik. Manfaat yang bisa dirasakan adalah kemampuan untuk melakukan perbandingan-perbandingan, pengenalan faktor penyebab dan lain sebagainya. ***Indikator Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pemalang 2019*** memberikan gambaran tentang taraf kesejahteraan rakyat, tetapi mengingat spektrum kesejahteraan rakyat sangat luas dan bisa multi kepentingan maka publikasi ini disajikan dalam batasan-batasan tertentu.

Publikasi ini hanya mencakup pada aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Informasi umum tentang kesejahteraan yang tercakup dalam publikasi ini antara lain meliputi bidang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Sumber data pokok yang digunakan adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016, 2017 dan 2018.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan bagi terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

https://pemalangkab.bps.go.id

Pemalang, Desember 2019
Kepala BPS
Kabupaten Pemalang

Dra. Prita Rextiana, MM

https://pemalangkab.bps.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR ISTILAH TEKNIS xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Wilayah 1

1.2 Jumlah Penduduk 1

1.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk 3

1.4 Rasio Jenis Kelamin 5

1.5 Struktur Umur 6

1.6 Rasio Ketergantungan 7

1.7 Fertilitas, Umur Perkawinan Pertama, dan Keluarga Berencana 11

BAB II KESEHATAN

2.1 Derajat Kesehatan Masyarakat 20

2.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan 22

2.3 Penggunaan Jaminan Kesehatan 28

BAB III PENDIDIKAN

3.1 Tingkat Pendidikan 32

3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 34

3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) 36

3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) 38

https://pemalangkab.bps.go.id

BAB IV PERUMAHAN

4.1 Kualitas Rumah Tempat Tinggal	42
4.2 Penguasaan Tempat Tinggal	44
4.3 Fasilitas Perumahan	45
4.4 Penguasaan Alat Komunikasi	46

https://pemalangkab.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018	3
Tabel 1.2	Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2018	5
Tabel 1.3	Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin. Kabupaten Pemalang Tahun 2018	7
Tabel 1.4	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2018	8
Tabel 1.5	Rasio Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2018	9
Tabel 1.6	Rasio Ketergantungan Penduduk dan Proporsi Penduduk Usia Produktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2018	10
Tabel 1.7	Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Pemalang Tahun 2018	12
Tabel 1.8	Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Alat KB yang Digunakan, Kabupaten Pemalang Tahun 2018	16
Tabel 2.1	Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018	21

https://pemalangkab.bps.go.id

Tabel 2.2	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang, 2016-2018	22
Tabel 2.3	Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018	24
Tabel 2.4	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat, Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018	25
Tabel 2.5	Persentase Balita Menurut Penolong Terakhir Proses Persalinan, Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018	26
Tabel 2.6	Persentase Penduduk Menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018	28
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, di Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018	33
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,di Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2016	35
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018	37
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Pemalang, 2016-2018	39
Tabel 4.1	Persentase Rumahtangga menurut Rata-rata Luas Lantai di Kabupaten Pemalang, Tahun 2016-2018	40

https://pemalangkab.bps.go.id

Tabel 4.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan, Kabupaten Pemalang, Tahun 2016-2018 41

Tabel 4.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal di Kabupaten Pemalang, Tahun 2016-2018 44

Tabel 4.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan di Kabupaten Pemalang, Tahun 2016-2018 45

Tabel 4.5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon, Telepon Selular, dan Komputer di Kabupaten Pemalang, Tahun 2016-2018 46

https://pemalangkab.bps.go.id

https://pemalangkab.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2018	6
Gambar 1.2	Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Partisipasi ber-KB di Kabupaten Pemalang Tahun 2018	14
Gambar 1.3	Persentase Penggunaan/Pemakaian Alat/Cara KB di Kabupaten Pemalang, Tahun 2016-2018	15

https://pemalangkab.bps.go.id

https://pemalangkab.bps.go.id

DAFTAR ISTILAH TEKNIS

KEPENDUDUKAN

1. Kepadatan Penduduk

   Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi. Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah tersebut.

2. Rasio Jenis Kelamin

   Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan 100.

3. Rasio Ketergantungan

   Perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun/anak-anak dan 65 tahun ke atas/lansia) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dikalikan 100.

4. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama

   Rata-rata umur seorang wanita pada saat melaksanakan perkawinan yang pertama kali.

5. Partisipasi Keluarga Berencana

   Proporsi peserta Keluarga Berencana (KB) aktif terhadap jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

6. Kontrasepsi Tetap (Kontap)

   Alat/cara KB yang bersifat permanen/tetap, meliputi: MOW, MOP, AKDR/IUD dan Susuk/Implant.

KESEHATAN

1. Angka Kesakitan/Morbiditas

   Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga terganggu aktifitasnya. Keluhan kesehatan adalah

https://pemalangkab.bps.go.id

gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

PENDIDIKAN

1. APS (Angka Partisipasi Sekolah)

   Proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Sekolah memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

2. APM (Angka Partisipasi Murni)

   Proporsi jumlah anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka Partisipasi Murni membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan.

3. APK (Angka Partisipasi Kasar)

   Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara

https://pemalangkab.bps.go.id

umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu.

PERUMAHAN

1. Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari sebatas atap.

2. Dinding Rumah

Sisi luar/batas dari suatu bangunan/penyekat dengan bangunan fisik lain.

3. Atap Rumah

Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya.

4. Fasilitas Air Minum

Instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau Non PAM/PDAM termasuk sumur gali dan sumur pompa.

5. Fasilitas Buang Air Besar

Kemudahan suatu rumah tangga dalam menggunakan jamban.

https://pemalangkab.bps.go.id

https://pemalangkab.bps.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Wilayah

Kabupaten Pemalang adalah sebuah kabupaten yang diapit oleh Kabupaten Tegal di sebelah Barat dan Kabupaten Pekalongan di sebelah Timur. Di sebelah utara Laut Jawa dan di sebelah selatan Gunung Slamet. Dengan kontur permukaan demikian menjadikan Pemalang memiliki karakteristik yang istimewa.

Pemerintahan terdiri dari 14 Kecamatan dan 222 Desa/Kelurahan dengan karakteristik topografi sebagai berikut;

- 54 Desa/Kelurahan berada di daerah lereng. Desa/Kelurahan ini sebagian besar berada di bagian selatan Kabupaten Pemalang.
- 168 Desa/Kelurahan berada di daerah dataran. Desa/Kelurahan ini sebagian besar berada di daerah utara Kabupaten Pemalang.

Luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah 1.115,30 Km2 yang terdiri dari :

- Luas lahan sawah : 363,82 Km2
- Luas lahan bukan sawah : 751,48 Km2

https://pemalangkab.bps.go.id

1.2 Jumlah Penduduk

Sensus Penduduk 2010 (SP2010) adalah kegiatan BPS setiap 10 tahun sekali dimana outputnya adalah jumlah penduduk pada saat sensus dan angka turunannya. Setiap 10 tahun sekali ada survei antar sensus. Dari setiap Sensus Penduduk dan survei antar sensus dihitung proyeksi jumlah penduduk untuk beberapa tahun ke depan.

Penduduk merupakan modal dasar dalam suatu pembangunan. Akan tetapi jumlah penduduk yang tidak terkendali

dapat memicu banyak permasalahan, seperti mengenai penyediaan sandang, pangan dan papan. Permasalahan tersebut dapat menganggu kesejahteraan masyarakat yang tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya. Penyediaan makanan yang tidak tercukupi akan menimbulkan terjadinya kelaparan. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi akan menimbulkan pemukiman kumuh, liar, dan tidak layak.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pembangunan dan kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem informasi kependudukan yang handal, sehingga upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2018 adalah sebesar 1.299.432 jiwa dengan menggunakan hasil penghitungan proyeksi penduduk yang mengacu pada hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Jumlah penduduk ini mengalami peningkatan sebesar 3.160 jiwa atau sekitar 0,243 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017 yang mencapai 1.296.272 jiwa. Secara regional, Kabupaten Pemalang dengan penduduk 1,299 juta jiwa termasuk kabupaten dengan jumlah penduduk relatif tinggi.

Tabel 1.1 menunjukkan persentase penduduk perempuan mencapai 50,51 persen sedikit lebih banyak dibanding persentase penduduk laki-laki sekitar 49,49 persen pada tahun 2018. Kondisi tersebut juga terjadi di tahun 2016 dan tahun 2017 yang menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan lebih tinggi jika di bandingkan persentase penduduk laki-laki.

https://pemalangkab.bps.go.id

Tabel 1.1:
Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin,
Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018

Jenis Kelamin	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
• Laki-laki	49,50	49,49	49,49
• Perempuan	50,50	50,51	50,51
• Laki-laki + Perempuan	100,00	100,00	100,00
Jumlah	1.292.573	1.296.272	1.299.432

Sumber: Angka Proyeksi Penduduk

https://pemalangkab.bps.go.id

1.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah. Persebaran penduduk antar daerah yang kurang merata menimbulkan masalah pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Selain itu, persebaran penduduk yang tidak merata juga mengakibatkan perbedaan tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibandingkan luas wilayahnya yang dihitung dalam satuan jiwa per km persegi. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak sedangkan lahan dan luas wilayah tidaklah bertambah.

Tidak meratanya persebaran penduduk akan menyebabkan berbagai ketimpangan fasilitas dan sumber daya antar kecamatan tersebut. Kecamatan dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan seperti meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak diimbangi dengan memadainya lapangan

pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk permukiman, tidak tercukupinya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Bagi kecamatan dengan jumlah yang sedikit akan mengakibatkan kekurangan tenaga kerja untuk mengolah lahan pertanian yang luas sehingga menyebabkan sumber-sumber daya alam/kekayaan yang ada tidak atau belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan Tabel 1.2, Kecamatan Pemalang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di antara 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang, yakni sebesar 178.392 jiwa atau 13,73 persen dari total penduduk Kabupaten Pemalang. Sedangkan Kecamatan Warungpring merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit sebesar 39.085 jiwa atau 3,01 persen.

Bila dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, pada tahun 2018 kepadatan penduduk di seluruh kecamatan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Pada tahun 2018, kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang tercatat sebesar 1.165 jiwa setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Comal yang mencapai sekitar 3.362 jiwa setiap kilometer perseginya diikuti Kecamatan Taman dan Kecamatan Petarukan dengan masing-masing kepadatan penduduk sekitar 2.410 jiwa setiap kilometer perseginya dan 1.815 jiwa setiap kilometer perseginya. Sementara itu, kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Watukumpul (504 jiwa setiap kilometer perseginya), Kecamatan Bantarbolang (520 jiwa setiap kilometer perseginya) dan Kecamatan Bodeh (642 jiwa setiap kilometer perseginya).

https://pemalangkab.bps.go.id

Tabel 1.2:
Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2018

Kecamatan	Luas (Km^2)	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Persentase	Kepadatan Per Km^2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Moga	41,41	31.633	32.137	63.769	4,91	1.540
Warungpring	26,31	19.280	19.805	39.085	3,01	1.486
Pulosari	87,52	27.871	28.325	56.196	4,32	642
Belik	124,54	52.695	52.313	105.008	8,08	843
Watukumpul	129,02	32.378	32.710	65.088	5,01	504
Bodeh	85,98	27.245	27.595	54.840	4,22	638
Bantarbolang	139,19	34.858	37.516	72.374	5,57	520
Randudongkal	90,32	47.818	50.313	98.130	7,55	1.086
Pemalang	101,93	88.271	90.120	178.392	13,73	1.750
Taman	67,41	80.578	81.905	162.483	12,50	2.410
Petarukan	81,29	73.030	74.518	147.547	11,35	1.815
Ampelgading	53,3	32.875	33.933	66.808	5,14	1.253
Comal	26,54	44.369	44.857	89.226	6,87	3.362
Ulujami	60,55	50.092	50.393	100.485	7,73	1.660
J u m l a h	1.115,30	642.992	656.440	1.299.432	100	1.165

Sumber: Angka Proyeksi Penduduk

https://pemalangkab.bps.go.id

1.4 Rasio Jenis Kelamin

Menurut hasil proyeksi SP2010 diperkirakan jumlah penduduk perempuan tahun 2018 di Pemalang lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yakni 656.440 jiwa berbanding 642.992 jiwa. Dengan nilai rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 97,95 hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pada tahun 2018 di Kabupaten

Pemalang terdapat 98 orang laki-laki pada setiap 100 orang perempuan.

Gambar 1.1:
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2018

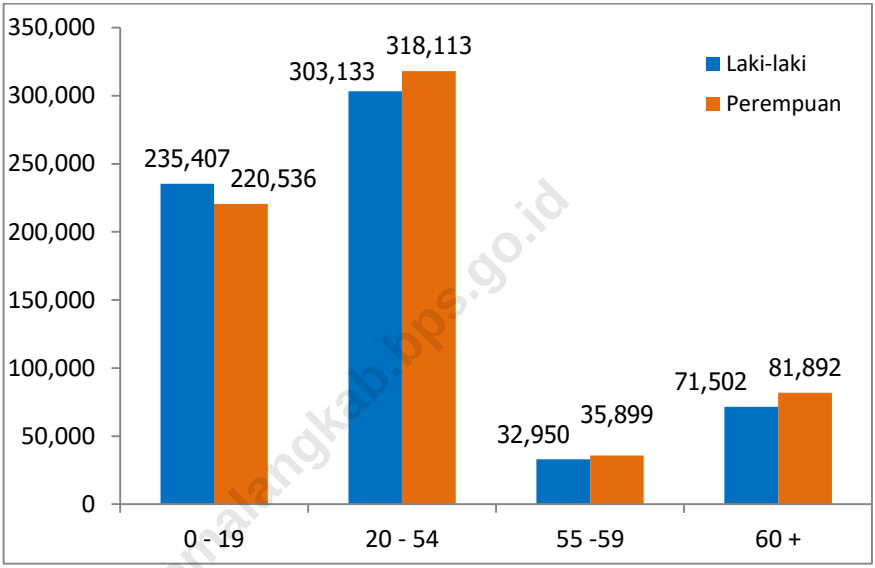

https://pemalangkab.bps.go.id

Dilihat menurut kelompok umur, hanya kelompok penduduk berumur 0-19 tahun yang menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan (Gambar 1.1). Sedangkan untuk kelompok umur yang lebih tinggi jumlah perempuan selalu lebih banyak dari jumlah lak-laki. Hal ini dimungkinkan karena penduduk laki-laki usia lebih dari 19 tahun bekerja di luar wilayah Kabupaten Pemalang.

1.5 Struktur Umur

Struktur umur penduduk Pemalang mengalami transisi menuju ke penduduk tua. Struktur tersebut ditandai dengan semakin berkurangnya penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) dan

semakin bertambahnya penduduk pada kelompok usia dewasa (15-64 tahun) serta kelompok usia tua (65 tahun ke atas).

Berdasarkan pengolahan proyeksi penduduk Kabupaten Pemalang, penduduk laki-laki muda yang berumur 0-14 tahun pada tahun 2018 tercatat sebesar 27,32 persen, atau lebih tinggi dibanding penduduk perempuan muda yang tercatat sebesar 25,18 persen. Hal tersebut di atas tidak berlaku untuk kelompok penduduk produktif (15 – 64 tahun) dimana penduduk laki-laki produktif sebesar 65,86 persen berbanding penduduk perempuan produktif sebanyak 66,64 persen. Demikian juga dengan kelompok usia tua (65 tahun ke atas), dimana persentase penduduk laki-laki, masing-masing sebesar 6,82 persen, lebih rendah dibanding persentase penduduk perempuan, masing-masing sebesar 8,17 persen.

https://pemalangkab.bps.go.id

Tabel 1.3:
Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,
Kabupaten Pemalang Tahun 2018

Kelompok Umur	L		P		L + P	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 14	175.664	27,32	165.297	25,18	340.961	26,24
15 - 64	423.497	65,86	437.481	66,64	860.978	66,26
65 +	43.831	6,82	53.662	8,17	97.493	7,50
Jumlah	642.992	100,00	656.440	100,00	1.299.432	100,00

Sumber: Angka Proyeksi Penduduk

1.6 Rasio Ketergantungan

Salah satu indikator kependudukan lainnya yang mengalami perubahan sebagai akibat terjadinya perubahan struktur penduduk menurut umur adalah angka rasio ketergantungan. Angka ini diartikan sebagai banyaknya penduduk tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) dan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Secara fungsional, indikator ini dari tahun ke tahun cenderung semakin rendah sebagai akibat turunnya jumlah penduduk usia muda dan naiknya jumlah penduduk usia produktif.

Tabel 1.4 terlihat distribusi penduduk menurut umur menunjukkan bahwa 26,24 persen penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2018 yang berusia muda, 66,26 persen berusia produktif, dan hanya 7,50 persen yang berumur 65 tahun ke atas, sehingga berdasarkan angka mutlaknya diperoleh angka ketergantungan penduduk Pemalang tahun 2018 sebesar 50,93. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 51 orang penduduk usia tidak produktif.

https://pemalangkab.bps.go.id

Tabel 1.4:
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,
Kabupaten Pemalang Tahun 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 14	27,32	25,18	26,24
15 - 64	65,86	66,64	66,26
65 +	6,82	8,17	7,50

Sumber: SP2010, Angka Proyeksi Penduduk

Berdasarkan Tabel 1.5 menunjukkan bahwa beban tanggungan pada penduduk produktif laki-laki (51,83) lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk produktif perempuan (50,05). Tinggi rendahnya rasio ketergantungan mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, berarti semakin besar hambatan atas upaya perkembangan daerah.

Tabel 1.5:
Rasio Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2018

Jenis Kelamin	Muda	Tua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	27,32	6,82	34,14
Perempuan	25,18	8,17	33,36
Laki-laki + Perempuan	26,24	7,50	33,74

Sumber: Angka Proyeksi Penduduk

Tingginya persentase penduduk usia muda (0-14 tahun) di Kabupaten Pemalang (26,24 persen) menyebabkan tingginya rasio ketergantungan penduduk muda (39,60 persen) dibandingkan rasio ketergantungan penduduk tua (11,32 persen). Ini mengindikasikan bahwa program-program pembangunan di Kabupaten Pemalang masih perlu diprioritaskan pada penduduk usia muda (0-14 tahun) khususnya di bidang pendidikan.

https://pemalangkab.bps.go.id

Tabel 1.6:
Rasio Ketergantungan Penduduk dan Proporsi Penduduk Usia Produktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2018

.

Kecamatan	Rasio Ketergantungan	Persentase Penduduk Usia Produktif
(1)	(2)	(3)
1. Moga	59,45	62,71
2. Warungpring	57,03	63,68
3. Pulosari	50,62	66,39
4. Belik	53,33	65,22
5. Watukumpul	55,67	64,24
6. Bodeh	52,57	65,55
7. Bantarbolang	52,44	65,60
8. Randudongkal	49,79	66,76
9. Pemalang	46,48	68,27
10. Taman	49,69	66,81
11. Petarukan	50,60	66,40
12. Ampelgading	50,79	66,32
13. Comal	46,81	68,12
14. Ulujami	51,88	65,84
Kab. Pemalang	50,93	66,26

Sumber: Angka Proyeksi Penduduk

Proporsi penduduk usia produktif tertinggi di Kabupaten Pemalang ada di Kecamatan Pemalang (68,27 persen). Hal ini mengakibatkan angka rasio ketergantungan di Kecamatan Pemalang paling rendah (46,48 persen) dibandingkan angka rasio ketergantungan kecamatan lainnya. Sebaliknya proporsi penduduk usia produktif terendah di Kecamatan Moga (62,71 persen), dimana angka rasio ketergantungannya paling tinggi mencapai 59,45.

Perbandingan angka rasio ketergantungan antar kecamatan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Tabel 1.6.

1.7 Fertilitas, Umur Perkawinan Pertama, dan Keluarga Berencana

Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk di samping migrasi masuk. Tingkat kelahiran di masa lalu mempengaruhi tingginya tingkat fertilitas masa kini. Jumlah kelahiran yang tinggi di masa lalu disertai dengan penurunan kematian bayi akan menyebabkan bayi- bayi tersebut tetap hidup dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disaat kematian bayi masih tinggi. Lima belas tahun kemudian bayi-bayi ini akan membentuk kelompok perempuan usia subur.

Pembangunan dan perbaikan keadaan sosial ekonomi penduduk akan mengakibatkan penurunan tingkat kelahiran. Namun pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial ekonomi mempunyai dampak yang sangat lambat terhadap penurunan tingkat kelahiran. Mengingat hal tersebut dan rawannya masalah kependudukan maka diperlukan usaha-usaha yang dapat menurunkan tingkat kelahiran secara langsung dan lebih cepat. Usaha untuk menurunkan tingkat kelahiran dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana.

Umur perkawinan, khususnya bagi wanita merupakan ciri kependudukan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat kelahiran. Oleh karena itu, usaha untuk menurunkan tingkat kelahiran perlu pula didukung oleh usaha untuk menaikkan umur perkawinan. Semakin tinggi umur perkawinan menyebabkan masa reproduksi

https://pemalangkab.bps.go.id

wanita lebih pendek. Hal ini berarti pula bahwa penundaaan perkawinan mengakibatkan berkurangnya peluang wanita untuk melahirkan anak lebih banyak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara eksplisit menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita menjadi suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa umur minimum laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun sementara itu umur minimum perempuan untuk menikah adalah 16 tahun.

Tabel 1.7:
Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018

Tahun	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
< 17 th	22,40	21,47	20,63
17-18 th	24,55	22,69	23,52
19-24 th	43,19	43,34	45,10
25 th+	9,86	12,50	10,75
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016-2018

Tabel 1.7 menunjukkan, pada tahun 2018 sebanyak 45,10 persen wanita di Kabupaten Pemalang menikah pertama kali pada umur antara 19-24 tahun dan hanya 10,75 persen yang menikah pada umur 25 tahun ke atas. Sedangkan wanita yang menikah pertama kali pada umur 18 tahun ke bawah sebanyak 44,15 persen.

Berdasarkan Tabel 1.7, persentase wanita yang melangsungkan perkawinan pada umur lebih muda (<17 tahun) dalam kurun waktu 2016 hingga 2018 terjadi penurunan. Semoga akibat dari kesadaran dan pengetahuan yang lebih baik sehingga memutuskan menunda perkawinan. Pada tahun 2016 persentase wanita yang umur perkawinan pertamanya di bawah 17 tahun sekitar 22,40 persen menjadi 21,47 persen pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 persentasenya turun menjadi 20,63 persen.

Kebanyakan wanita di Pemalang memilih menikah pada usia 19-24 tahun, lebih dari 40 persen dari jumlah keseluruhan wanita menikah. Jika dikaitkan dengan aktifitas lain, secara umum mereka yang menikah diusia 19-24 tahun telah menyelesaikan pendidikan menengah atas dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Persentase wanita yang menikah pada umur 19-24 tahun mengalami peningkatan selama 2016-2018. Ini imbas dari menurunnya persentase wanita menikah diusia bawah 17 tahun.

Persentase wanita yang menikah pada umur 25 tahun ke atas relatif stagnan. Tahun 2016 sebanyak 9,86 persen, lalu 2017 naik menjadi 12,56 persen dan tahun 2018 menurun menjadi 10,75 persen.

Selain melalui penundaan umur perkawinan pertama, partisipasi masyarakat dalam menangani masalah kependudukan adalah menyukseskan program Keluarga Berencana. Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Hal ini bisa ditempuh antara lain dengan cara pemakaian alat kontrasepsi KB. Melalui alat kontrasepsi, wanita dapat mengatur jarak kelahiran dan membatasi jumlah kelahiran.

https://pemalangkab.bps.go.id

Gambar 1.2:
Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut
Partisipasi ber-KB di Kabupaten Pemalang Tahun 2018

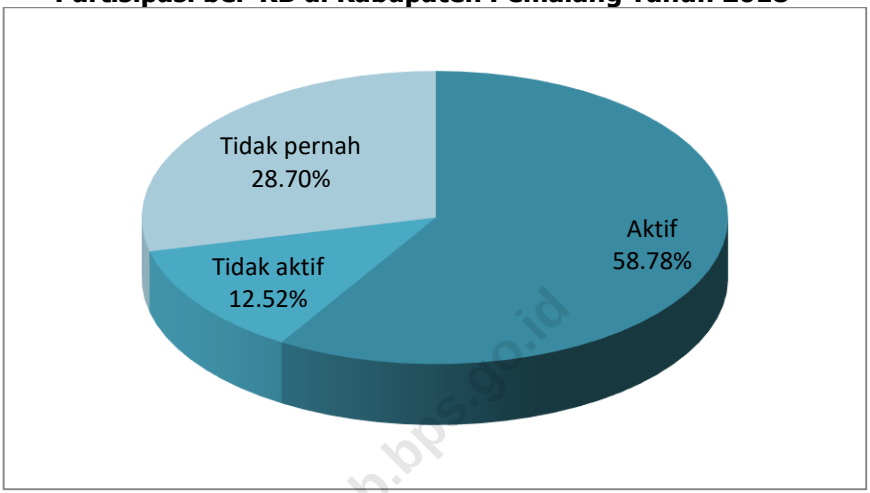

https://pemalangkab.bps.go.id

Jika dilihat di Gambar 1.2, persentase wanita umur 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat kontrasepsi ada sebanyak 58,78 persen, sementara persentase wanita yang pernah menggunakan alat kontrasepsi dan sekarang sudah tidak menggunakan lagi sebanyak 12,52 persen dan sisanya sebanyak 28,70 persen yang tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi.

KB sering disosialisasikan sebagai pembatasan kelahiran, pada dasarnya memang demikian, tetapi yang sering terlupakan adalah bahwa tujuan KB adalah bagaimana keluarga berencana, merencanakan masa depannya. Titik tekannya pada rencana, bukan pembatasan kelahiran.

Pensosialisasian seperti itu yang kemudian mendapat penentangan dari pihak-pihak yang tidak setuju kelahiran dibatasi. Ditambah beberapa persoalan menjadikan persentase tidak pernah ber-KB menjadi besar, 28,70%.

Gambar 1.3:
Persentase Penggunaan/Pemakaian Alat/Cara KB di Kabupaten Pemalang,
Tahun 2016-2018

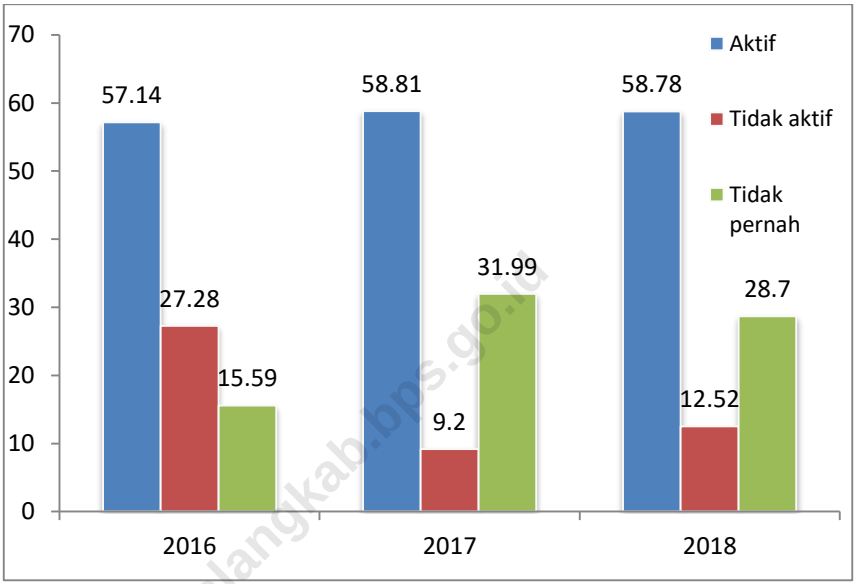

https://pemalangkab.bps.go.id

Gambar 1.3 menyajikan persentase penggunaan/pemakaian alat/cara KB selama periode tahun 2016-2018. Secara persentase tidak nampak adanya perubahan yang signifikan, walaupun secara agregat ada penambahan pasangan usia subur. Bisa disimpulkan bahwa program program keluarga berencana perlu dievaluasi dan dicari titik masalah dan pembenahannya.

Akseptor KB tidak aktif berarti pernah ber-KB. Jika alasan berhenti ber-KB karena sesuatu yang terencana maka seyogyanya perlu didukung. Tetapi jika berhenti ber-KB karena alasan alasan yang tidak rasional dan atau adanya kekurangan pada pelayanan KB maka itu perlu dikoreksi bersama dan perlu edukasi yang kompehensif.

Tabel 1.8 menyajikan dari 58,78 persen wanita umur 15-49 tahun pengguna alat kontrasepsi pada tahun 2018, cara yang paling banyak digunakan antara lain adalah Suntik KB (60,91 persen), Pil KB (11,67 persen), Susuk KB (7,29 persen) dan Kontap (5,31 persen). Tidak seperti tahun tahun sebelumnya dimana kondom dan lain-lain merupakan alat kontrasepsi yang penggunaannya paling rendah, pada tahun 2018 bertambah banyak pemakainya yaitu sebesar 4,62 persen. Dan mengalahkan IUD/spiral yang sebesar 3,82 persen.

Tabel 1.8:
Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Alat KB yang Digunakan, Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018

Jenis Alat KB	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Kontap	5,34	5,50	5,31
IUD/Spiral	4,36	4,79	3,82
Suntikan	69,33	67,45	60,91
Susuk	4,50	8,17	7,29
Pil KB	14,54	12,93	11,67
Kondom dll	1,93	1,55	4,62

Sumber: Susenas 2016-2018

Berdasarkan Tabel 1.8 persentase akseptor KB menurut jenis alat/cara KB yang dipakai tampak bahwa akseptor yang menggunakan Suntik KB menempati urutan tertinggi selama periode tahun 2016-2018, yaitu sekitar 69,33 persen pada tahun 2016, 67,45 persen pada tahun 2017, dan 60,91 persen pada tahun 2018. Tingginya persentase penggunaan alat kontrasepsi Suntik KB disebabkan alat ini

relatif praktis, mudah pemakaiannya (tidak membuat akseptor malu/risih pada saat pemasangan seperti misalnya IUD) dan efek sampingnya juga tidak terlalu besar, sehingga untuk wanita yang sibuk, cenderung lebih memilih jenis alat kontrasepsi ini. Kelebihan lain dari alat kontrasepsi ini adalah jika akseptor ingin berhenti, bisa dilakukan pada saat yang dikehendaki oleh akseptor. Alat/cara ini relatif lebih aman bagi kebanyakan wanita dan relatif lebih murah dan mudah didapatkan.

https://pemalangkab.bps.go.id

https://pemalangkab.bps.go.id

BAB II
KESEHATAN

Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Oleh sebab itu, tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka proses dan dinamika pembangunan ekonomi di wilayah tersebut akan semakin baik. Pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan kemudahan akses pelayanan publik di bidang kesehatan, meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau.

Peningkatan kualitas hidup penduduk merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Peningkatan kualitas penduduk secara fisik dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan. Indikator utama yang dipakai untuk melihat derajat kesehatan penduduk salah satunya adalah angka kesakitan. Program pembangunan di bidang kesehatan juga bertujuan untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk. Meningkatnya derajat kesehatan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk sehingga dapat mencapai kesejahteraan.

https://pemalangkab.bps.go.id

2.1 Derajat Kesehatan Masyarakat

Keadaan kesehatan penduduk pada suatu saat dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk pada umumnya. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, status kesehatan memberikan pengaruh pada tingkat produktivitas. Oleh karena itu, untuk mengukur status kesehatan digunakan indikator angka kesakitan. Angka kesakitan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan terganggu aktifitasnya sehari-hari yang terjadi selama satu bulan sebelum pencacahan.

Berdasarkan Tabel 2.1, angka kesakitan penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2018 mencapai 16,55 persen. Selama 3 tahun terakhir angka kesakitan di Kabupaten Pemalang mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 sebesar 22,48 persen kemudian turun menjadi 21,65 persen pada tahun 2017, dan kemudian turun cukup signifikan 16,55 persen pada tahun 2018.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, angka kesakitan di Kabupaten Pemalang baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan relatif sama pada tahun 2018. Namun demikian angka kesakitan penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi (16,81 persen) dibandingkan angka kesakitan penduduk perempuan (16,29 persen). Hal ini mungkin disebabkan oleh laki-laki kurang bisa menjaga keseimbangan aktifitas hidupnya karena harus bekerja mencari nafkah sehingga sering mengalami kelelahan dan keletihan setelah bekerja keras.

Dibandingkan antar tahun selama periode 2016-2018, angka kesakitan untuk penduduk laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan cukup positif di tahun 2018 yaitu dari 22,39 persen

https://pemalangkab.bps.go.id

tahun 2016 menjadi 16,81 persen tahun 2018 untuk penduduk laki-laki dan dari 22,30 persen tahun 2016 menjadi 16,29 persen pada tahun 2018 untuk penduduk perempuan.

Tabel 2.1:
Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018

Angka Kesakitan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
L	22,39	22,57	16,81
P	22,30	20,75	16,29
L + P	22,48	21,65	16,55
Rata-rata Lama Sakit (hari)			
< 4	55.01	53,04	-
4 - 7	35.52	34,25	-
8 - 30	9.47	12,61	-

Sumber: Susenas 2016-2018

Berdasarkan Tabel 2.1 sebagian besar penduduk mengalami sakit selama 1-7 hari yakni sebesar 87,29 persen pada tahun 2017. Sementara yang mengalami sakit lebih dari 7 hari hanya sebesar 12,61 persen. Dibandingkan tahun 2016, lama sakit penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2017 relatif lebih lama. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 penduduk yang sakit di Kabupaten Pemalang mengalami durasi sakit lebih dari 7 hari sebanyak 9,47 persen menurun menjadi 12,61 persen pada tahun 2017. Sedangkan penduduk yang durasi sakit kurang dari 8 hari menurun, yaitu 90,53

https://pemalangkab.bps.go.id

persen pada tahun 2016 menurun menjadi 87,29 persen pada tahun 2017.

2.2. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, serta kualitas pelayanan. Salah satu indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan.

Tabel 2.2:
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang, 2016-2018

Jenis Kelamin	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	51,37	46,52	42,65
Perempuan	52,35	48,44	41,62
Laki-laki + Perempuan	51,87	47,52	42,11

Sumber: Susenas 2016-2018

Berdasarkan Tabel 2.2, penduduk yang megalami keluhan kesehatan dan berobat jalan sebanyak 42,11 persen pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka persentase penduduk yang berobat jalan mengalami penurunan dimana persentasenya mencapai 47,52 pada tahun 2017.

https://pemalangkab.bps.go.id

Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, tahun 2018 diketahui bahwa persentase penduduk laki-laki yang berobat jalan (42,65 persen) tidak berbeda secara signifikan dengan penduduk perempuan yang berobat jalan (41,62 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan dalam berobat masih menjadi pilihan utama bagi laki-laki dan perempuan yang mengalami keluhan kesehatan.

Jika dilihat dari persentase penduduk yang berobat jalan, tahun 2018 masih ada 57,89 persen penduduk yang tidak berobat jalan. Cara pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat selain berobat jalan adalah mengobati sendiri atau merasa tidak perlu diobati. Untuk itu perlu diketahui alasan apa saja yang menjadi penyebab masyarakat tidak berobat jalan. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Pada Tabel 2.3, tahun 2018 alasan penduduk yang mengalami keluhan tidak berobat jalan adalah mengobati sendiri dimana persentasenya mencapai 73,72 persen. Kemudian disusul dengan alasan merasa tidak perlu sebesar 22,10 persen.

Cukup menarik diperhatikan bahwa dari tahun ke tahun alasan tidak berobat jalan bukanlah alasan ekonomi. Ada beberapa kemungkinan mengenai hal tersebut. Mungkin yang bersangkutan memang kurang perduli terhadap kesehatannya, khususnya bagi yang tingkat pendidikannya rendah. Atau memiliki kemampuan untuk mengobati sendiri pada tingkatan sederhana atau menengah. Atau tidak memiliki kepercayaan kepada institusi kesehatan dan merasa lebih nyaman jika berobat sendiri.

https://pemalangkab.bps.go.id

Tabel 2.3:
Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018

Alasan Tidak Berobat Jalan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
• Tidak punya biaya berobat	0,22	0,98	1,20
• Tidak ada biaya transport	0,93	0,19	0,47
• Tidak ada sarana transportasi	0,00	0,02	0,86
• Waktu tunggu pelayanan lama	0,00	1,02	0,31
• Mengobati sendiri	77,78	77,49	73,72
• Tidak ada yang mendampingi	0,31	0,51	0,33
• Merasa tidak perlu	19,57	17,94	22,10
• Lainnya	1,19	1,85	1,01
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016-2018

https://pemalangkab.bps.go.id

Tabel 2.4 tahun 2018 menunjukkan bahwa walaupun terjadi penurunan cukup tajam praktek dokter/bidan merupakan tempat/cara berobat yang paling banyak dipakai oleh penduduk yang berobat jalan yaitu sebesar 42,51 persen. Kemudian disusul puskesmas/pustu sebesar 36,96 persen. Selama periode 2016-2018 selain praktek dokter/bidan dan puskesmas/pustu yang saling suplay, tidak banyak perbedaan dalam hal persentase tempat cara/berobat yang digunakan oleh penduduk yang berobat jalan, tidak ada perbedaan yang signifikan.

Perpindahan yang biasanya ke dokter/bidan praktek saat berobat jalan menjadi ke puskesmas/pustu (tahun 2017 ke tahun

2018) mungkin disebabkan semakin baiknya pelayanan puskesmas/pustu sehingga tingkat kepuasan masyarakat meningkat, atau bisa jadi karena selama ini dokter/bidan praktek dikenal lebih mahal dari pada biaya ke puskesmas/pustu mungkin karena kemampuan ekonomi menjadi penyebab berubahnya pilihan berobat jalan.

Tabel 2.4:
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat/Cara Berobat, Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018

Tempat/Cara Berobat	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
o RS Pemerintah	5,40	3,57	1,79
o RS Swasta	5,64	6,45	4,12
o Praktek Dokter/Bidan	52,90	53,51	42,51
o Klinik/Praktik Dokter Bersama	7,89	11,42	15,95
o Puskesmas/Pustu	29,55	29,79	36,96
o UKBM	0,45	0,93	1,69
o Praktik pengobatan Tradisional/Alternatif	2,28	1,55	1,60
o Lainnya	0,62	0,69	0,46
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016-2018

Jenis tenaga penolong proses kelahiran menentukan keberhasilan kelahiran dan akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi yang ditolong. Data mengenai penolong proses kelahiran dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan

https://pemalangkab.bps.go.id

kesehatan secara umum. Pelayanan yang aman dilakukan oleh Dokter atau Bidan pada saat proses kelahiran bayi.

Tabel 2.5:
Persentase Balita Menurut Penolong Terakhir Proses Kelahiran,
Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018

Penolong Terakhir Kelahiran	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Dokter	19,27	31,67	30,94
Bidan	72,11	63,94	67,10
Tenaga Medis Lain	1,83	0,00	0,00
Dukun Bersalin	6,79	4,39	1,96
Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016-2018

https://pemalangkab.bps.go.id

Tabel 2.5 menunjukkan persentase penolong kelahiran balita yang terakhir di Kabupaten Pemalang tahun 2018 sebagian besar adalah oleh Bidan (67,10 persen) dan Dokter (30,94 persen). Tenaga kesehatan bidan cenderung lebih banyak dikunjungi karena bidan praktek maupun bidan desa aksesnya mudah serta biayanya pun terjangkau bagi sebagian besar masyarakat.

Pada tahun 2018 masih ada sebanyak 1,96 persen yang masih menggunakan tenaga non medis, jauh menurun dibanding tahun 2017 yang sebesar 4,39 persen. Ini berarti bahwa masyarakat Kabupaten Pemalang telah semakin paham dan sadar akan pentingnya proses kelahiran. Paham akan pentingnya fase persalinan dalam kehidupan bayi maupun ibunya. Sedang yang masih memercayakan proses

persalinan kepada dukun bersalin, terutama di perdesaan, mungkin hal ini karena masalah biaya dan jarak ke akses fasilitas kesehatan di daerah tersebut yang cukup jauh.

Dari tahun ke tahun terlihat dari tabel 2.5 bahwa dokter semakin berperan dalam proses penolong persalinan yang terakhir. Hal ini banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memberikan pembatasan pembatasan kepada bidan dalam pelayanannya demi peningkatan rasio kesehatan masyarakat. Diantaranya adalah bidan harus memiliki ijin rumah bersalin jika ingin membuka layanan rawat inap.

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin membaik dengan adanya fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga dapat secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perubahan pola pikir tentang pola hidup sehat. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang relatif mudah, murah dan merata dapat membantu masyarakat untuk berperilaku sehat. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah pengadaan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan, pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat, penambahan dan peningkatan kualitas petugas kesehatan, dan pemberian penyuluhan tentang pentingnya hidup bersih dan sehat.

Perhatian pemerintah terhadap kesehatan semakin ditingkatkan terutama pada ibu hamil dan balita. Salah satu tujuan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah meningkatkan kemandirian keluarga dalam memelihara kesehatan ibu dan anak.

https://pemalangkab.bps.go.id

Dalam keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok yang paling rentan dan peka, terhadap berbagai masalah kesehatan.

2.3 Penggunaan Jaminan Kesehatan

Pembangunan kesehatan yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pemerintah berupaya menyediakan jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Dengan adanya jaminan kesehatan tersebut, diharapkan kebutuhan untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang optimal dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.6:
Persentase Penduduk menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki,
Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018

Jaminan Kesehatan yang Dimiliki	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
❖ BPJS Kesehatan	55,79	52,15	28,44
❖ Jamkesda	2,91	2,81	2,05
❖ Asuransi Swasta	0,17	0,71	0,00
❖ Perusahaan/Kantor	0,13	1,89	0,46
❖ Tidak Memiliki	45,58	42,64	69,05
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016-2018

Tabel 2.6 memperlihatkan bahwa terjadi perubahan besar pada kepemilikan jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan semakin

https://pemalangkab.bps.go.id

ditinggalkan oleh masyarakat. Pada tahun 2016 masih ada 55,79 persen penduduk ikut serta dalam BPJS Kesehatan, pada tahun 2018 tersisa 28,44 persen. Berbagai keluhan pelayanan nampaknya menjadi penyebab ketidak bersediaan penduduk untuk menggunakan BPJS Kesehatan walaupun bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

Berita terakhir bahwa BPJS Kesehatan mengalami kerugian dan untuk menutupinya salah satunya dengan cara meningkatkan iuran. Bisa jadi karena hal tersebut memicu keengganan masyarakat untuk mengikuti BPJS Kesehatan, atau yang sudah ikut program BPJS menjadi enggan untuk membayar iuran dan saat wawancara menjawab tidak ikut serta pelayanan BPJS Kesehatan.

https://pemalangkab.bps.go.id

https://pemalangkab.bps.go.id

BAB III
PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan, ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang di dalamnya. Pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis serta merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Pendidikan dari segi kehidupan sangat penting bagi perkembangan hidup manusia karena merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu.

Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, Pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Oleh karena itu pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya.

Dalam pembangunan, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang masih mendapatkan perhatian paling besar. Hal ini disebabkan karena masih ditemukannya masalah mendasar dalam bidang pendidikan. Angka putus sekolah yang masih cukup tinggi, kesenjangan mendapatkan kesempatan pendidikan antar kelompok penduduk dan antara daerah, serta kualitas pendidikan yang belum bisa memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang semakin kompetitif, merupakan beberapa permasalahan mendasar pendidikan.

https://pemalangkab.bps.go.id

Tingkat pendidikan penduduk juga dapat menggambarkan kesejahteraan penduduk. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan (ijazah tertinggi yang dimiliki).

3.1 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tabel 3.1, penduduk Pemalang berumur 10 tahun ke atas tahun 2018 yang tidak/belum menamatkan pendidikan di bangku Sekolah Dasar masih relatif tinggi yaitu 31,27 persen. Penduduk yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai Sekolah Dasar sebesar 34,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk dengan pendidikan hingga SD termasuk mereka yang belum pernah sekolah tercatat sekitar 65,91 persen. Persentase yang cukup tinggi ini membawa konsekuensi antara lain upaya peningkatan kualitas SDM ataupun keterampilan mereka semakin komplek. Sementara itu, masih sedikit penduduk yang mampu menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan perguruan tinggi, yaitu hanya 3,19 persen. Untuk menganalisis lebih komprehensif persoalan tersebut akan diuraikan di sub bab berikutnya.

https://pemalangkab.bps.go.id

Tabel 3.1:
Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, di Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2016			2017			2018		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
• Tdk/blm pernah sekolah	2,98	6,55	4,80	2,20	7,79	5,04	2,74	8,12	5,47
• Tdk/Blm tamat SD	24,16	25,44	24,81	25,33	26,07	25,71	25,61	25,98	25,80
• SD/MI	41,82	40,79	41,30	36,49	33,39	34,92	35,43	33,87	34,64
• SMP/MTs	12,81	14,32	13,58	19,42	18,36	18,88	20,04	18,99	19,50
• SMA/MA/SMK	14,78	9,97	12,33	12,54	9,86	11,17	13,46	9,40	11,40
• Perguruan Tinggi	3,45	2,93	3,18	4,02	4,53	4,28	2,74	3,64	3,19

Sumber: Susenas 2016-2018

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa persentase penduduk perempuan yang tidak/belum sekolah dan tidak/belum tamat SD/MI lebih banyak dibandingkan persentase penduduk laki-laki yang tidak/belum sekolah dan tidak/belum tamat SD/MI pada tahun 2018, masing masing 28,35 persen untuk penduduk laki-laki dan 34,10 persen untuk penduduk perempuan.

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat pula bahwa tingkat pendidikan penduduk laki-laki yang tamat di jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA lebih tinggi dibanding tingkat pendidikan penduduk perempuan. Persentase penduduk laki-laki yang tamat SD/MI sebesar 35,43 persen, sedangkan persentase penduduk perempuan 33,87 persen. Sementara untuk jenjang SMP/MTs, persentase penduduk laki-laki yang menamatkannya lebih tinggi dari persentase penduduk perempuan, yaitu sebesar 20,04

https://pemalangkab.bps.go.id

persen berbanding 18,99 persen. Penduduk laki-laki yang tamat SMA/MA sebesar 13,46 persen, sedangkan penduduk perempuan hanya 9,40 persen. Sementara itu, persentase laki-laki yang menamatkan pendidikan hingga tingkat Diploma/Universitas sebesar 2,74 persen lebih sedikit dibandingkan persentase penduduk perempuan yang menamatkan pendidikan Diploma/Universitas yaitu sebesar 3,64 persen.

Jika dilihat dari periode tahun 2016-2018, persentase tingkat pendidikan penduduk yang tamat SMP/MTs hingga Diploma/Univ relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya, masing-masing sebesar 29,09 persen ditahun 2016, meningkat menjadi 34,33 persen di tahun 2017, menurun sedikit menjadi 34,09 persen di tahun 2018.

3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada kelompok umur tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu tanpa memperhatikan jenjang pendidikannya. APS untuk kelompok umur 7-12 tahun diperoleh dari persentase jumlah penduduk umur 7-12 tahun yang masih bersekolah dibagi dengan jumlah penduduk umur 7-12 tahun. Di Kabupaten Pemalang, pada tingkat sekolah dasar terdapat 100,00 persen penduduk telah bersekolah pada tahun 2018. Ini berarti bahwa semua anak berumur 7-12 tahun sedang sekolah.

https://pemalangkab.bps.go.id

Tabel 3.2:
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,
di Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
2016			
7-12	100,00	99,21	99,64
13-15	89,33	89,87	89,61
16-18	60,04	51,93	56,01
2017			
7-12	99,42	100,00	99,70
13-15	90,68	91,68	91,17
16-18	54,61	72,52	62,28
2018			
7-12	100,00	100,00	100,00
13-15	89,43	95,28	92,32
16-18	59,31	60,37	59,83

Sumber: Susenas 2016-2018

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat dilihat penduduk umur 13-15 tahun yang sedang bersekolah sebanyak 92,32 persen dan penduduk yang berumur 16-18 tahun yang sedang bersekolah sebanyak 59,83 persen. Selama kurun waktu 2016-2018, angka partisipasi sekolah penduduk di kelompok umur 7-12 dan 13-15 yang masih sekolah mengalami peningkatan. Sedang untuk kelompok umur 16-18 tahun 2018 mengalami penurunan, berarti di tahun 2018 ada sejumlah lulusan SMP yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Penurunannya cukup signifikan, di tahun 2017 ada sebesar 62,28 persen, tahun 2018 menjadi 59,83 persen.

https://pemalangkab.bps.go.id

Partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan relatif sama di setiap kelompok umur sekolah pada setiap tahunnya antara tahun 2016-2018. Yang nampak berbeda hanya di kelompok umur 13-15 pada tahun 2018. Laki laki 89,43 dan perempuan 95,28 persen. Kemungkinan ini hanya semacam residual saja. Tahun 2019 akan kembali relatif sama.

Pola yang digambarkan oleh partisipasi sekolah untuk penduduk laki-laki dan perempuan tidak berbeda yaitu semakin tinggi kelompok umur sekolah maka partisipasinya semakin kecil. Dari gambaran partisipasi tersebut terlihat bahwa kesempatan antara penduduk perempuan dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan adalah sama.

https://pemalang.jateng.bps.go.id

3.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok umur yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Semakin tinggi APM berarti banyak anak pada kelompok umur tertentu yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Selama kurun waktu 2016-2018 APM di Kabupaten Pemalang tidak banyak mengalami perubahan secara signifikan. Pada tabel 3.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebesar 97,75 persen penduduk berumur 7-12 tahun sedang bersekolah di Sekolah Dasar. Sementara itu, penduduk umur 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs sebesar 79,31 persen, penduduk umur 16-18 tahun yang sekolah di SMA/SMK/MA sebesar 59,31 persen.

Tabel 3.3:
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin,
Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018

Tahun/Jenjang Pendidikan	APM		
	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
2016			
SD	95,95	94,16	95,14
SMP	74,15	74,04	74,10
SMA/SMK/MA	51,42	46,13	48,80
2017			
SD	97,47	96,77	97,13
SMP	78,60	79,70	79,13
SMA/SMK/MA	58,02	60,43	59,20
2018			
SD	97,77	97,74	97,75
SMP	77,89	80,82	79,31
SMA/SMK/MA	59,67	58,94	59,31

Sumber: Susenas 2016-2018

https://pemalangkab.bps.go.id

Dibanding tahun-tahun sebelumnya, APM untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan. Angka partisipasi sekolah untuk Sekolah Dasar meningkat yaitu dari 95,14 persen di tahun 2016 meningkat menjadi 97,75 persen di tahun 2018. Sedangkan APM untuk SMP/MTs mengalami peningkatan dari 74,10 persen di tahun 2016 menjadi 79,31 persen di tahun 2018. Pada tingkat SMA/SMK/MA, Angka Partisipasi Murni juga mengalami peningkatan dari 48,80 persen di tahun 2016 menjadi 59,31 persen di tahun 2018.

3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar merupakan rasio jumlah siswa, berapapun umurnya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan adanya siswa dengan umur lebih tua dibanding umur standar di jenjang pendidikan tertentu. Kondisi ini menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding umur standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di umur yang lebih muda.

Tetapi sekarang ada peraturan yang membatasi anak bersekolah. Sebelum mencapai umur 7 tahun belum diperbolehkan bersekolah di SD. Sehingga angka partisipasi kasar tidak terkoreksi oleh anak anak tersebut.

https://pemalangkab.bps.go.id

Tabel 3.4:
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Pemalang, 2016-2018

Tahun/Jenjang Pendidikan	APK		
	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
2016			
SD/MI	108,36	106,68	107,52
SMP/MTs	88,84	86,42	87,61
SMA/SMK/MA	107,52	87,61	74,48
2017			
SD/MI	109,14	120,10	114,40
SMP/MTs	109,14	120,10	114,40
SMA/SMK/MA	63,50	81,88	71,38
2018			
SD/MI	113,29	108,23	110,76
SMP/MTs	87,58	98,82	93,14
SMA/SMK/MA	73,49	66,21	69,90

Sumber: Susenas 2016-2018

https://pemalangkab.bps.go.id

Seperti pada Tabel 3.4, APK SD/MI tahun 2018 sebesar 110,76 persen. Sedangkan untuk APK tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing sebesar 93,14 persen dan 69,90 persen. Jika dibandingkan tahun 2016, APK SD/MI dan SMA/SMK/MA mengalami penurunan. APK untuk SMP/MTs mengalami peningkatan dari 87,61 persen menjadi 93,14 persen. Pada tingkat SMA/SMK/MA, APK menurun dari 74,48 persen menjadi 69,90 persen. Sementara APK pada tingkat SD/MI menurun yaitu dari sebesar 107,52 persen pada tahun 2016 menjadi 110,76 persen pada tahun 2018.

https://pemalangkab.bps.go.id

BAB IV
PERUMAHAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus berkembang

Keadaan perumahan adalah salah satu faktor yang menentukan keadaan higienis dan sanitasi lingkungan. Seperti yang dikemukakan oleh WHO bahwa perumahan yang tidak sehat dan terlalu sempit mengakibatkan mudah terjangkitnya penyakit dalam masyarakat. Rumah yang sehat dan layak huni tidak harus berwujud rumah mewah dan besar namun rumah yang sederhana dapat juga menjadi rumah yang sehat dan layak dihuni. Rumah sehat adalah kondisi fisik, kimia, biologi di dalam rumah dan perumahan sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Secara umum kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan. Selain kualitas bahan bangunan yang digunakan dan juga ditentukan oleh fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, keadaan ini dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Tempat tinggal dengan dukungan fasilitas lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya.

https://pemalangkab.bps.go.id

4.1 Kualitas Rumah Tempat Tinggal

Luas rumah yang ditempati dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Semakin tinggi status sosial suatu rumah tangga maka semakin luas lantai yang dikuasai rumah tangga. Oleh karena itu, luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Pada Tabel 5.1 menggambarkan luas lantai rumah (dalam meter persegi) yang ditempati rumah tangga. Di Kabupaten Pemalang pada tahun 2018, rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 49 meter persegi sebesar 16,28 persen, dan yang menempati rumah dengan luas lantai 50 meter persegi keatas sebesar 83,72 persen.

Tabel 4.1:
Persentase Rumahtangga menurut Rata-rata Luas Lantai di Kabupaten Pemalang, Tahun 2016-2018

Luas Lantai (m2)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
<20	0,60	0,14	0,89
20-49	15,17	14,43	15,39
50-99	68,12	66,11	61,32
100-149	12,88	13,55	14,70
150+	3,23	5,77	7,70
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016-2018

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 49 meter persegi dan luas lantai 50 meter persegi atau lebih relatif sama dengan tahun

https://pemalangkab.bps.go.id

2018. Rumah tangga dengan luas lantai 50 m2 ke atas yaitu sebesar 83,72 persen dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 84,23 persen.

Tetapi selama 2016-2018 nampak ada peningkatan rumah tangga yang memiliki luas di atas 100 m2. Rumah tangga dengan luas lantai 50-99 m2 menurun, berarti ada penambahan luas lantai antara tahun 2016 hingga 2018 untuk rumah tangga yang semula luas lantainya sekitar 50-99 m2.

Tabel 4.2:
Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan, Kabupaten Pemalang, Tahun 2016-2018

Kualitas Perumahan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai Bukan Tanah	83,41	86,35	86,47
Atap Layak	99,59	99,73	99,75
Dinding Permanen	95,59	97,40	96,54

Sumber: Susenas 2016-2018

https://pemalangkab.bps.go.id

Semakin banyak rumah tinggal yang menggunakan lantai bukan tanah mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas perumahan di suatu daerah. Rumah tangga yang mempunyai rumah tinggal berlantai bukan tanah di Kabupaten Pemalang sebesar 86,47 persen pada tahun 2018, dapat dilihat di Tabel 4.2.

Secara keseluruhan, bila dilihat dari kualitas bahan bangunan yang digunakan, kondisi perumahan di Kabupaten Pemalang relatif memenuhi kriteria rumah sehat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase rumah tinggal dengan atap layak (99,75 persen) dan dinding permanen (94,54 persen).

4.2 Penguasaan Tempat Tinggal

Status penguasaan tempat tinggal merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Semakin banyak persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut.

Tabel 4.3:
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tinggal di Kabupaten Pemalang, Tahun 2016-2018

Status Penguasaan Tempat Tinggal	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	94,00	86,38	86,12
Kontrak/Sewa	0,59	2,38	1,20
Dinas/Bebas Sewa/Lainnya	5,41	11,24	12,68

Sumber: Susenas 2016-2018

https://pemalangkab.bps.go.id

Seperti pada Tabel 4.3, persentase rumah tangga di Kabupaten Pemalang yang menempati rumah sendiri sebesar 86,12 persen, dan yang menempati rumah kontrak/sewa sebesar 1,20 persen, sedangkan yang menempati rumah dinas/bebas sewa/lainnya sebesar 12,68 persen.

Dibanding tahun sebelumnya, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah sendiri sedikit mengalami penurunan, yaitu dari 94,00 persen pada tahun 2016 menjadi 86,12 persen pada tahun 2018. Persentase rumah tangga yang menempati rumah kontrak atau sewa juga mengalami peningkatan yaitu dari 0,59 persen pada tahun 2016 menjadi 1,2 persen pada tahun 2018. Sementara itu, rumah

tangga yang tinggal di rumah dinas atau bebas sewa menurun yaitu dari 5,41 persen pada tahun 2016 menjadi 12,68 persen pada tahun 2018.

4.3 Fasilitas Perumahan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kualitas bangunannya akan tetapi juga ditentukan oleh fasilitas yang digunakan oleh rumah tangga tersebut, seperti fasilitas penerangan, air minum, maupun jamban sendiri yang menggunakan tangki septik.

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa pada tahun 2018 penggunaan fasilitas perumahan seperti penerangan listrik dan air bersih sudah relatif banyak dimanfaatkan masyarakat. Berdasarkan data Susenas 2018, rumah tangga di Kabupaten Pemalang hampir semuanya sudah memiliki fasilitas penerangan listrik, terdapat 41,74 persen rumah tangga yang telah memiliki fasilitas air minum kemasan/leding, dan 73,24 persen memiliki jamban sendiri.

https://pemalangkab.bps.go.id

Tabel 4.4:
Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan di Kabupaten Pemalang
Tahun 2016-2018

Fasilitas Perumahan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerangan Listrik	100,00	100,00	99,84
Air Minum Kemasan/Leding	28,31	41,88	41,74
Jamban Sendiri	74,52	75,94	73,24

Sumber: Susenas 2016-2018

Pemanfaatan fasilitas penerangan listrik pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan yang tahun sebelumnya telah mencapai 100 persen, hal ini mungkin saja terjadi karena adanya rumah baru dan rumah tangga baru. Penggunaan fasilitas jamban juga menurun yaitu sebesar 74,52 persen di tahun 2016 menjadi 73,24 persen di tahun 2018. Penggunaan fasilitas air minum kemasan/leding meningkat, 28,31 persen pada tahun 2016 menjadi 41,74 persen pada tahun 2018.

4.4 Penguasaan Alat Komunikasi

Sesuai dengan perkembangan teknologi alat komunikasi seperti telepon, telepon selular *(handphone)*, dan komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Berdasarkan Tabel 4.5, hanya sekitar 1,37 persen rumah tangga di Kabupaten Pemalang yang telah memiliki telepon, 74,54 persen rumah tangga yang memiliki telepon seluler. Kepemilikan komputer bagi rumah tangga di Kabupaten Pemalang masih rendah yaitu hanya sebesar 10,28 persen.

https://pemalangkab.bps.go.id

Tabel 4.5:
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon, Telepon Selular, dan Komputer di Kabupaten Pemalang, Tahun 2016-2018

Alat Komunikasi	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Telepon	0,84	1,04	1,37
Telepon Selular	52,08	56,56	74,54
Komputer	10,82	11,84	10,28

Sumber: Susenas 2016-2018

Berdasarkan Tabel 4.5, persentase rumah tangga yang memiliki telepon berfluktuasi selama periode tahun 2016-2018 dari 0,84 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 1,37 persen pada tahun 2018. Sementara itu, rumah tangga yang memiliki telepon selular meningkat selama periode tahun 2016-2018 dari 52,08 persen di tahun 2016 menjadi 56,56 persen di tahun 2016 dan meningkat menjadi 74,54 persen pada tahun 2018.

Kepemilikian komputer mengalami fluktuatif selama periode tahun 2016-2018, yaitu dari 10,82 persen di tahun 2016 meningkat menjadi 11,84 persen di tahun 2017 dan meningkat lagi menjadi 10,28 di tahun 2018.

https://pemalangkab.bps.go.id

https://pemalangkab.bps.go.id

Sensus Penduduk 2020
#MencatatIndonesia

DATA
MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PEMALANG
Jl. Tentara Pelajar 16 Pemalang 52313 Indonesia
Telepon : (0284) 321169
Homepage : https://pemalangkab.bps.go.id Email : bps3327@bps.go.id